

ABSTRAK

Fenomena penataan pedagang kaki lima seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Karawang berharap kotanya bersih dan pedagang kaki lima tertata baik, namun disisi lain kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesemrawutan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda diharapkan mampu membantu Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karawang dalam menegakkan Peraturan Daerah salah satunya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang PKL. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala yang dihadapinya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah analitis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode logika hukum dengan cara induksi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten karawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang. Upaya penataan dan pemberdayaan melalui upaya preventif melalui pendataan, sosialisai dan pembinaan; teguran; dan koordinasi serta upaya represif berupa relokasi dan penyitaan. Pada akhir penelitian ini, penulis merekomendasikan agar melakukan penambahan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan wawasan dan profesionalisme sumber daya manusia, Menjaln kerja sama dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur masyarakat.

Kata kunci: Penyidik Pegawai Negeri sipil, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah

ABSTRACT

The phenomenon of structuring street vendors (PKL) is like two sides of a coin. On the one hand, the Karawang regency government hopes that the city will be clean and the street vendors well organized, but on the other hand, the reality in the field shows irregularity condition. In order to overcome this problem, a Regional Regulation Number 4 Of 2015 was issued concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. Civil Servant Investigators (PPNS) of Civil Service Police Unit as an enforcement apparatus of the Regional Regulation is expected to be able to help the Civil Service Police Unit in Karawang District in enforcing Regional Regulations, which one is by conducting investigations related violations of Perda carried out by PKL. The problem in this study is how the role of PPNS of Civil Service Police Units in structuring and empowering street vendors in Karawang District is connected with Regional Regulation Number 4 Of 2015 concerning The Arrangement And Empowerment Of Street Vendors and the obstacles it faces. This study aims to determine the role of the PPNS of Civil Service Police in structuring and empowering street vendors in Karawang District linked to Regional Regulation Number 4 Of 2015 concerning The Arrangement And Empowerment Of Street Vendors and the obstacles it faces. The research method in this study uses an empirical juridical approach. The research specifications are descriptive analytical. This research was conducted in three stages, namely the pre-research stage, the implementation phase, and the report making stage. Data collection techniques in this study were carried out through library research and field research. Data analysis in this study used legal logic by induction in drawing conclusions. The study was conducted in Karawang District. The results showed that Investigators of Civil Servants Unit of the Civil Service Police played a role in structuring and empowering street vendors in Karawang Regency. Arrangement and empowerment efforts through preventive efforts through data collection, socialization and guidance; reprimand; and coordination and repressive efforts in the form of relocation and confiscation. At the end of this study, the authors recommended that an increase in the number of Civil Servant Investigators, increase the insight and professionalism of human resources, establish cooperation with law enforcement officials and all elements of society.

Keywords: *Civil Servant Investigators, Street Vendors, Regional Regulations*